



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI VI DPR RI**  
**PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 – 2024**  
**KE GIANYAR PROVINSI BALI**  
**22-26 APRIL 2024**

---

Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunker Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Gianyar Provinsi Bali pada tanggal 22-26 April 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Aria Bima Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VI DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunker Reses Komisi VI DPR RI ke Gianyar Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dalam rangka peninjauan Kinerja Perusahaan dan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan peningkatan inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat serta perlindungan konsumen di Sektor Keuangan di Provinsi Bali.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan RI, Bappebti Kementerian Perdagangan RI, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Taspen (Persero).

Dalam pertemuannya, Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa dalam meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat serta perlindungan konsumen di Sektor Keuangan bagi masyarakat pada tahun 2023 telah berhasil mendampingi sebanyak 5.304 Usaha Mikro mengakses KUR atau 108,24 % dari target pendampingan KUR 4.900 Usaha Mikro. Dan dari Ditjen PKTN di dalam meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat terdapat 9 sektor prioritas, serta 2 sektor pendukung Perlindungan Konsumen. Sedangkan Bappebti memberikan pemahaman mengenai 3 instrumen Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), yang meliputi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Sedangkan penjelasan dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di dalam upaya meningkat inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat serta Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan bagi masyarakat secara tidak langsung turut mendorong pada peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi adalah inklusi dan literasi atas keuangan syariah yang masih rendah. BSI berperan strategis dalam pengembangan ekonomi. BSI hadir di Provinsi Bali didukung oleh Jaringan kantor/outlet untuk memberikan akses keuangan syariah yang inklusif. Dengan jumlah penduduk Provinsi Bali 4,3 Juta 81 Ribu merupakan nasabah BSI (2%), sehingga potensi masih cukup besar.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI mendorong keberadaan Kementerian BUMN RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan RI, Bappebti Kementerian Perdagangan RI, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Taspen (Persero) di Provinsi Bali untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Instansi/Lembaga terkait, BUMN-BUMN lainnya serta pihak swasta dalam berkontribusi bagi masyarakat dan pengembangan perekonomian Provinsi Bali.

Gianyar, 26 April 2024  
Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI  
ke Gianyar Provinsi Bali.